

NASIONALISME

Anggraeni Kusumawardani & Faturochman

PENDAHULUAN

Permasalahan nasionalisme di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi fokus perhatian para sejarawan yang peduli dengan eksistensi negara Republik Indonesia. Kartodirjo (2001), seorang sejarawan senior dari UGM, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pertikaian antar elit politik di Indonesia. Kartodirjo menilai bahwa etos nasionalisme para elit politik di Indonesia telah menipis, karenanya Kartodirjo menghimbau agar para elit politik segera mawas diri dengan mempelajari kembali sejarah pergerakan nasional melalui biografi tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Kekhawatiran senada juga pernah diungkapkan oleh Prabowo (1995) yang menyatakan sebagian generasi muda Indonesia saat ini mengalami erosi nasionalisme. Menurut Prabowo, hal ini ditandai dengan sikap sebagian generasi muda yang kurang menghayati simbol-simbol kebangsaan, seperti lagu Indonesia Raya dan bendera Merah-Putih.

Kompas edisi 5 Maret 1999 memuat pernyataan pengamat politik Indonesia, Ben Anderson. Dalam ceramahnya yang bertajuk *Nasionalisme Kini dan Esok* di Jakarta mengenai kontinuitas bangsa Indonesia di masa depan, Anderson mengatakan bahwa kebesaran jiwa bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk sangat penting bagi kelanjutan bangsa ini. Oleh karena itu nasionalisme, atau semangat kebangsaan, merupakan suatu proyek bersama yang senantiasa harus diperjuangkan. Bangsa Indonesia harus mampu mengambil pelajaran dari beberapa negara yang hancur akibat warganya berjiwa kerdil. Data yang dipaparkan oleh Sudjatmiko (1999) menunjukkan bahwa pada abad ke-20 terdapat lebih dari sepuluh kasus disintegrasi, antara lain Korea Utara-Korea Selatan (1948), Jerman Barat-Jerman Timur (1949), Malaysia-Singapura (1965), dan Uni Soviet (1990). Data sepanjang tahun 1945–1995 mencatat terjadi 38 perang, 64 kasus separatisme dan 62 konflik ideologi atau faksional. Kasus separatisme yang terjadi di benua Afrika tercatat 21 kasus, Timur Tengah 12 kasus, Asia Selatan 10 kasus, Asia Tenggara 11 kasus, Asia Timur 1 kasus, Eropa Timur 2 kasus, Eropa Barat 2 kasus dan Uni Soviet 5 kasus.

Fakta disintegrasi yang terjadi pada beberapa negara menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi negara Indonesia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara kesatuan. Lepasnya Timor Timur menjadi negara baru Timor Leste di penghujung tahun 1999 (Hidayat, 1999), serta keputusan menyerahkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan kepada Malaysia akhir tahun 2002 silam menjadi ujian nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Kerawanan disintegrasi dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, dirasakan semakin menguat di berbagai daerah, antara lain Aceh, Ambon, Papua dan Riau yang menyebabkan munculnya konflik-konflik sosial dalam masyarakat, terutama benturan antara penduduk asli pribumi dan penduduk pendatang.

Menurut Effendi (1995), alasan sebagian besar etnik dari suatu negara untuk melepaskan diri dari negara induk, antara lain karena perlakuan pemerintah pusat yang dirasakan tidak adil dan perasaan tertekan terus menerus karena diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Mengutip analisis Sindhunata (2000), keinginan disintegrasi dari berbagai daerah di Indonesia merupakan akumulasi dari ketidakpuasan identitas nasional yang dipaksakan selama ini. Sindhunata menambahkan bahwa nasionalisme di Indonesia telah mati karena ulah para penguasa yang berniat melanggengkan kekuasaannya. Bukti dari kematian berbangsa di Indonesia adalah homogenitas yang terjadi di tingkat lokal, padahal di tingkat lokal itu kebangsaan Indonesia sangat heterogen sehingga muncul keresahan dan kegelisahan masyarakat di tingkat lokal untuk mencari dan menemukan identitasnya masing-masing yang telah lama dikebiri.

Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkannya perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia.

Abad ke 19 dan ke 20 yang dijuluki sebagai abad ideologi merupakan masa yang penuh dengan benturan sosial yang meliputi hampir seluruh belahan dunia. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia menggulirkan pemahaman-pemahaman dan kesepakatan-kesepakatan yang mengarah pada tata dunia baru. Gagasan mengenai hak setiap bangsa untuk dapat menentukan nasib sendiri yang terjadi di berbagai belahan dunia disertai perasaan yang kuat untuk melepaskan diri dari penindasan yang dialami, mengantarkan masyarakat yang mendiami pulau-pulau yang terpisah untuk bersatu, bergabung memproklamkan diri sebagai bangsa Indonesia yang berjuang menegakkan kedaulatannya.

Tonggak sejarah yang terpenting dalam proses nasionalisme di Indonesia adalah ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, diikuti ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang mengilhami lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Proses nasionalisme tersebut berlanjut dan melandasi perjuangan-perjuangan berikutnya hingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah melalui proses yang sangat panjang dan berat. Keberhasilan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan melalui perjuangannya sendiri juga melahirkan pengakuan dunia bahwa nasionalisme Indonesia termasuk salah satu yang terkuat karena hanya sedikit negara dari dunia ketiga yang mampu merdeka melalui proses revolusi (Hara, 2000).

Lebih jauh lagi, Hara (2000) menilai kentalnya kaitan nasionalisme dengan perjuangan melawan penjajah pada masa tersebut turut menyebabkan keterbatasan pemahaman definisi nasionalisme. Ungkapan “hidup atau mati” atau “*right or wrong is my country*” yang dahulu lantang diucapkan oleh para pejuang kemerdekaan, menjadi hal yang semu dan kurang tepat dialamatkan pada generasi muda saat ini. Pergeseran makna dari nasionalisme itu sendiri tidak jarang menyebabkan penilaian negatif terhadap semangat nasionalisme generasi muda saat ini.

PENDEFINISIAN KEMBALI NASIONALISME

Sarman (1995) secara kritis menulis sempitnya kerangka pikir sebagian besar orang mengenai nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme sering diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa *reserve*, yang merupakan simbol patriotisme heroik semata sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara demi negara yang dicintai. Definisi tersebut menyebabkan makna nasionalisme menjadi usang dan tidak relevan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masa kini, yang tidak lagi bergelut dengan persoalan penjajahan dan merebut kemerdekaan dari tangan kolonialis.

Menurut Hara (2000), nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme, juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan yang turun temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Konskuensi dari pergeseran konteks nasionalisme menyebabkan orang tidak lagi bergantung hanya kepada identitas nasional, yang sifatnya makrokosmos abstrak

(Sindhunata, 2000), namun lebih menekankan pada identitas yang lebih konkrit seperti negara modern, pemerintah yang bersih, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebanggaan terhadap identitas suatu bangsa menjadi hal yang mustahil apabila seorang warga negara tidak menemukan kebanggaan tersebut dalam diri negaranya. Orang bukan saja malu terhadap identitas bangsanya bahkan orang tersebut tidak mengakui kebangsaan yang dimilikinya.

Prasodjo (2000) menilai pembelajaran atau pembangunan nasionalisme di Indonesia mengalami pembajakan terutama pada masa orde baru, karenanya solidaritas emosional berbangsa menjadi sulit tumbuh dan kebanggaan terhadap identitas nasional pun menjadi sulit terbentuk. Secara kritis, Hendaridi (2000) mengungkapkan peran orde baru untuk menyimpangkan arti nasionalisme demi memelihara kepentingannya yaitu menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan birokratik. Praktek tersebut dilakukan dengan menuding setiap upaya yang bertujuan membela kepentingan rakyat sebagai hal yang menghambat jalannya pembangunan. Tujuan para elit orde baru menyimpangkan arti nasionalisme yang sebenarnya adalah karena dua hal, yaitu agar elit orde baru kebal dari hukum (*impunity*) dan dapat menjalankan semua kepentingannya walau harus menindas dan mengorbankan hak asasi manusia bangsanya sendiri.

Beragam definisi nasionalisme yang dilontarkan para ahli kebangsaan, yang pada intinya mengarah pada sebuah konsep mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu di antara masyarakat dunia. Konsep nasionalisme juga sering dikaitkan dengan kegiatan politik karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara.

Nasionalisme menonjol sejak revolusi Perancis, sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan imperium Barat yang berhasil meluaskan penetrasi kekuasaannya ke berbagai belahan bumi. Dengan slogan "*liberte, egalite, fraternite*", nasionalisme menjadi ideologi baru yang sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi, dikarenakan tanpa sebuah negara nasional demokrasi akan sulit terwujud.

Berdasarkan sejarah Indonesia, tonggak lahirnya nasionalisme diyakini sejak lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang pada masa itu merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari Kebangkitan Nasional, yang perayaannya sendiri pertama kali pada tahun 1938, ketika lahirnya Parindra (Abdullah, 2001). Fakta lain yang menunjukkan perkembangan nasionalisme di Indonesia adalah pada saat kongres nasional *Centrale Sarekat Islam* (CSI) di Bandung pada tahun 1916. Tjokroaminoto, salah seorang tokoh inspirator kebangsaan Indonesia, menggunakan kata-kata

“nasional” untuk menggalang persatuan yang kuat di antara semua kelompok penduduk Hindia Belanda dalam rangka mencapai tingkat kebangsaan yang mampu mendirikan pemerintahan sendiri (Rachmat, 1996).

Lahirnya nasionalisme di Indonesia selain disebabkan penderitaan panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum dan politik, juga dipengaruhi oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan, antara lain dari Filipina dan India. Sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia disebabkan adanya perasaan senasib sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi subyektif, dan kemudian kondisi obyektif secara geografis menemukan koneksitasnya (Rachmat, 1996). Ditambahkannya, ada perbedaan kausal antara nasionalisme di Indonesia dengan nasionalisme di Eropa, yaitu bila nasionalisme di Indonesia muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial, tetapi di Eropa, nasionalisme lahir akibat adanya pergeseran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri sebagai dampak dari revolusi industri.

Nasionalisme pada hakikatnya merupakan suatu ideologi negara modern, seperti halnya demokrasi dan komunisme. Bahkan kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang bersifat ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok, menurut aliran Marxis, adalah titik pertemuan antara politik, teknologi dan transformasi sosial (Hosbawm, 1992).

Konsep mengenai bangsa yang baru dikenal pada abad ke-19 mengalami beberapa kali perubahan makna. Sebelum tahun 1884, *nacion* atau *nation* diartikan sebagai kumpulan penduduk dari suatu propinsi, negeri atau kerajaan, dan orang asing. Menurut Hosbawm (1992), makna tersebut berkembang menjadi suatu pemerintahan bersama yang tertinggi yang diakui oleh suatu negara atau badan politik, yang wilayah dan penduduknya merupakan suatu kebulatan. pengertian *nacao* dari *Enciclopedia Brasileira Merito*, yaitu;

...komunitas warga negara dari suatu negara, hidup di bawah rezim atau pemerintahan yang sama dan mempunyai suatu kepentingan-kepentingan bersama; kolektivitas dari penduduk di suatu wilayah dengan tradisi, aspirasi dan kepentingan bersama, dan tunduk di bawah suatu kekuatan pusat yang bertugas mempertahankan kesatuan dari kelompok tersebut..

Pada kamus Akademi Spanyol versi terakhir, kata “bangsa” tidak ditemukan hingga tahun 1925, yang pada waktu itu digambarkan sebagai kolektivitas dari orang-orang yang memiliki asal usul suku yang sama, pada umumnya berbicara dalam bahasa yang sama, serta memiliki tradisi yang serupa.

Dahulu kesetiaan orang tidak ditujukan bagi negara kebangsaan, melainkan kepada pelbagai macam bentuk kekuatan dan kekuasaan sosial, organisasi politik atau raja feodal, dan kesatuan ideologi seperti klen atau suku, negara kota, kerajaan dinasti, gereja dan golongan-golongan keagamaan. Selama berabad-abad lamanya, cita-cita dan tujuan politik bukanlah suatu negara-kebangsaan (Kohn, 1984).

John Stuart Mill (dalam Hosbawm, 1992) seorang ahli tata negara, merumuskan bangsa sebagai keinginan dari anggota-anggota nasionalitas untuk berada di bawah pemerintahan yang sama dan pemerintahan yang didirikan itu hendaklah berasal dari mereka sendiri atau sebagian dari mereka secara eksklusif. Bangsa dapat diartikan pula sebagai kelompok dari para warga negara, di mana terdapat ekspresi politik yang ditunjukkan melalui kedaulatan kolektif untuk membentuk sebuah negara. Kohn (1984) menyebutkan bahwa bangsa merupakan buah hasil hidup dalam sejarah, sehingga selalu bergelombang dan tak pernah membeku (dinamis).

Nasionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencintai bangsa dan negara. Mulyana (dalam Martaniah, 1990) mendefinisikan nasionalisme dengan kesadaran bernegara atau semangat nasional. Nasionalisme atau kebangsaan bukan sekedar instrumen yang berfungsi sebagai perekat kemajemukan secara eksternal, namun juga merupakan wadah yang menegaskan identitas Indonesia yang bersifat plural dalam berbagai dimensi kulturalnya. Nasionalisme menuntut adanya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi kepada kepentingan bersama dan menghindarkan segala legalisasi kepentingan pribadi yang merusak tatanan kehidupan bersama.

Suatu bangsa hanya dapat muncul apabila terdapat keinginan untuk hidup bersama, adanya jiwa dan pendirian rohaniah, adanya perasaan setia kawan yang besar yang terbentuk bukan disebabkan persamaan ras, bahasa, agama atau batas-batas negeri, melainkan terbentuk karena pengalaman-pengalaman historis yang menjembatani kesediaan untuk berkorban bersama. Suatu bangsa adalah sekelompok manusia dengan persamaan karakter atau watak yang tumbuh karena persamaan nasib atau pengalaman yang telah dijalani. Nasionalisme merupakan suatu kesadaran atau keinsyafan rakyat sebagai suatu bangsa. Stoddart menegaskan bahwa nasionalisme merupakan keyakinan yang diteguh sejumlah besar orang, yang merupakan suatu nasionalitas (Abdulgani, 1964).

SENDI-SENDI NASIONALISME

Soekarno, salah satu *founding father* negara Indonesia menyatakan bahwa suatu bangsa adalah suatu individualitas dan sebagaimana suatu individu, setiap bangsa memiliki perangai sendiri, yang berbeda dengan perangai bangsa lain. Soekarno juga mengajukan adanya syarat teritorial untuk mendefinisikan suatu bangsa, yaitu sekelompok manusia yang memiliki kemampuan bersatu yang kuat, mempunyai perangai bersama yang kuat, yang hidup dalam suatu daerah geopolitik yang merupakan suatu unit keseluruhan yang jelas. Sebagai contoh, Indonesia merupakan suatu unit yang teritorialnya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Sebutan Sunda, Jawa, Minangkabau, Bugis atau Ambon bukanlah menunjukkan suatu bangsa, karena bagian-bagian tersebut merupakan bagian dari unit Indonesia. Namun syarat yang diajukan Soekarno tersebut mendapat sanggahan dari Legge (1972) yang menunjuk Yahudi sebagai contoh. Bangsa Yahudi memiliki kesatuan nasional yang kuat selama berabad-abad walaupun bangsa Yahudi tidak memiliki kesatuan teritorial. Kohn (1984) menambahkan bahwa tidak ada faktor hakiki yang menentukan terbentuknya suatu bangsa. Hal terpenting terbentuknya sebuah bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama. Sebagai wujud nasionalisme seseorang harus bersedia menyerahkan kesetiannya yang tertinggi kepada negara kebangsaan. Unsur pokok dari kebangsaan adalah menjunjung tinggi komitmen terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disetujui melalui proses politik yang demokratis.

Molinari (dalam Kohn, 1984) berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan hal utama terbentuknya bangsa karena negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kenyamanan harta benda dan kontrak-kontrak ekonomis yang dilakukan warganya. Pembentukan bangsa mengisyaratkan adanya suatu ekonomi nasional yang dibina secara sistematis oleh negara, yang dalam abad 19 disebut dengan *proteksionisme*.

Sementara itu, Snyder (1968) menganggap bahwa motivasi psikologis merupakan hal yang berperan penting dalam pembangunan nasionalisme. Pada akhir perang dunia II, ketika resesi besar menimpa negara-negara kolonial yang diikuti meningkatnya kekuatan pada kelompok masyarakat yang tersisihkan, nasionalisme menawarkan harapan adanya kebebasan dan persamaan. Nasionalisme menjadi kompensasi bagi masyarakat yang merasa frustrasi.

Nasionalisme merupakan kesadaran dan kebanggaan bernegara yang menimbulkan sikap dan perasaan yang lebih mementingkan kehidupan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, daerah ataupun partai yang diwakili. Nasionalisme

juga dapat dipandang sebagai usaha *nation buiding* yang berarti mengubah loyalitas masyarakat dari loyalitas yang sempit, yaitu loyalitas terhadap suku, agama, ras dan sebagainya, menjadi loyalitas yang lebih luas, yaitu bangsa (dalam Martaniah, 1990).

Nasionalisme Indonesia menurut Soekarno (dalam Irwan, 2001), bukanlah *jingo-nasionalisme* atau *chauvinisme*, dan bukan pula suatu tiruan atau kopi dari nasionalisme barat. Nasionalisme adalah nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu.

Abdulgani (1964) mengemukakan tiga macam teori terbentuknya sebuah bangsa, yakni: (1) *Cultur-natie-theorie* (teori kebudayaan) yang menyebutkan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan kebudayaan; (2) *Staats-theorie* (teori negara) yang menyebutkan bahwa suatu bangsa timbul karena adanya negara, sehingga negara harus ada terlebih dahulu untuk membentuk sebuah bangsa; dan (3) *Geveols-natie-theorie* (teori kemauan, keinginan) yang menjelaskan bahwa syarat mutlak timbulnya suatu bangsa adalah adanya keinginan untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa, dan tidak memerlukan adanya persamaan kebudayaan, ras atau agama. Dari ketiga teori tersebut, nasionalisme Indonesia cenderung mengikuti teori yang ke tiga, yaitu *geveols-natie-theorie* karena bangsa Indonesia memiliki beragam ras, agama dan kebudayaan yang khas satu sama lain.

Berdasarkan sejarah kelahirannya, nasionalisme atau kebangsaan pada masa lampau merupakan suatu jalan tengah di antara dua kubu ekstrimitas yaitu kegelapan imperialisme atau kolonialisme dengan kebodohan etnosentrisme (Rachmat, 1996). Seiring dengan perkembangan dan perubahan kehidupan dunia, nasionalisme masih relevan dan kembali sebagai jalan tengah antara genderang globalisasi dan kebangkitan etnosentrisme di tengah masyarakat dunia.

Pergeseran tata sendi kehidupan, menyebabkan banyak hal dalam nasionalisme yang lampau, menjadi usang dan kurang bermakna pada masa sekarang ini. Sebagai contoh, slogan “hidup atau mati”, “*right or wrong is my country*” bukan saja terdengar asing tetapi juga dirasa naif, karena saat ini kesadaran terhadap persamaan hukum dan penghormatan hak asasi manusia menjadi hal yang esensial, melebihi rasa kebangsaan yang tidak pada tempatnya.

Pembinaan dan penyadaran terhadap makna kebangsaan tidak lagi hanya mengandalkan *trend* sloganistik yang pada batas tertentu hanya akan menumbuhkan romantisme yang tenggelam pada masa lampau dan mengaburkan makna (substansi) dari nasionalisme yang hakiki. Walaupun demikian, slogan dan simbol tetap diperlukan dalam menumbuhkan identitas nasional, sepanjang slogan dan simbol tersebut bersifat relatif jujur dan proporsional (Rachmat, 1996).

Nasionalisme sebagai suatu ideologi, memerlukan aktualisasi sesuai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, separatisme atau ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal di luar itu, seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi dan sebagainya (Rachmat, 1996). Hal ini mengacu pada esensi dasar dari nasionalisme yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang menyiratkan suatu keadilan yang menyeluruh, yang harus mampu dirasakan semua anggota bangsa. Kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan menandakan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam suatu masyarakat bangsa, yang berarti bertentangan dengan esensi dasar nasionalisme.

FUNGSI PSIKOLOGIS

Menurut Crano (dalam De Dreu & De Vries, 2001), nasionalisme berfungsi untuk memberikan identitas sosial pada diri seseorang, yaitu apakah ia termasuk bagian suatu kelompok. Keanggotaan tersebut akan melahirkan suatu konskuensi yang harus ditanggung oleh para anggota kelompok tersebut. Salah satu konskuensinya yakni para anggota kelompok berupaya secara aktif mempertahankan keutuhan kelompok dari ancaman yang datang dari luar. Crano menambahkan, nasionalisme sebagai suatu identitas sosial tidak berarti sebagai suatu upaya penyeragaman para anggotanya. Setiap anggota dibebaskan memilih posisi dan porsinya sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dan tidak membahayakan keutuhan kelompok.

Identitas sosial merupakan suatu pengetahuan individu yang dimilikinya terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu bersama dengan keseluruhan perasaan dan nilai-nilai yang signifikan dengan keanggotaannya pada kelompok-kelompok sosial tersebut. Kelompok sosial terdiri atas dua atau lebih individu yang saling berbagi identifikasi sosial umum dari diri masing-masing, atau yang memiliki kemiripan tertentu dan merasa sebagai bagian dari kategori sosial yang sama. Individu akan senantiasa memelihara citra diri yang positif dengan mengikatkan diri ke dalam kelompoknya, agar dirinya dapat di pandang secara positif dalam kelompok tersebut (Feather, 1994). Maka setiap warga negara Indonesia, harus senantiasa menjaga keutuhan negara Indonesia dan berupaya memelihara citra diri yang dimilikinya dengan bersikap dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia.

Menurut Kartodirjo (1993) identitas sosial baru sebagai bangsa Indonesia merupakan kesadaran kolektif yang dimaksudkan untuk menggantikan “identitas negatif” yang diberikan kolonialis. Sebutan *inlander* pada masa kolonial mendorong

kesadaran sejumlah orang yang terpelajar untuk berontak terhadap keadaan dan membentuk identitas sosial yang baru. Tujuannya untuk menentukan kedudukan kelompok dalam sistem masyarakat, serta menyadari batas-batas kedudukan golongan lain terhadap kelompok tersebut.

Rumusan nasionalisme Indonesia khas dan berbeda dengan nasionalisme bangsa lain, karena tujuan nasionalisme secara umum adalah memberikan label identitas terhadap suatu bangsa. Meskipun dimungkinkan ada kesamaan antara konsep suatu bangsa dengan bangsa lain, namun karena dasar setiap negara berbeda maka tiap negara akan memiliki konsep berbangsa yang unik atau khas (Martaniah, 1990).

Pancasila sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup) bangsa Indonesia maka wawasan kebangsaan Indonesia harus sejalan dengan kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila. Landasan UUD 1945 juga memberikan batasan bahwa nasionalisme Indonesia bertentangan dengan segala bentuk penindasan oleh seorang manusia terhadap manusia lain, oleh suatu negara terhadap negara lain dan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain (Rachmat, 1996).

Amal dan Armawi (1995) menyebutkan bahwa kualitas berbangsa di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tiga pandangan, yaitu: (1) Pandangan ketahanan nasional yang sejalan dengan rumusan GBHN, (2) Pandangan karakteristik nasional yang menekankan kepribadian unik dari bangsa Indonesia, dan (3) Pandangan integrasi nasional yang menyiratkan upaya persatuan dari kemajemukan yang menjadi bagian bangsa dan negara Indonesia.

Karakteristik dari nasionalisme yang dimiliki seseorang digambarkan oleh beberapa ahli dengan menunjukkan sikap-sikap tertentu yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kodiran (dalam Martaniah, 1990) menyebutkan bahwa hasrat-hasrat untuk berprestasi, berencana, bertanggung jawab, keterbukaan, kemandirian, kehormatan, rasionalitas dan keadilan merupakan sendi-sendi utama dalam kualitas berbangsa dan bernegara seorang warga negara.

Schoorl (dalam Martaniah, 1982) mengkaitkan sikap nasionalisme dalam negara modern dengan keterlibatan warga negara terhadap kegiatan politik, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Perkembangan sebuah negara harus mampu mendorong setiap warganya menjadi seorang manusia modern yang diperlukan dalam pembangunan. Menurut Inkeles (dalam Martaniah, 1990), ada tujuh karakter yang harus dimiliki seorang manusia modern, yakni (1) Terbuka terhadap pengalaman baru dan perubahan, (2) Mampu berpendapat dan menanggapi berbagai persoalan secara demokratis, serta tidak menutup diri terhadap pendapat yang berbeda, (3) Mempunyai perencanaan dan berorientasi ke masa depan, (4) Percaya kepada kemampuan diri dan

tidak pasrah terhadap nasib, (5) Memiliki harga diri dan mampu menghargai orang lain, (6) Mampu menggunakan teknologi dan pengetahuan untuk kemajuan dan peningkatan taraf hidup manusia, dan (7) Menjunjung keadilan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Martaniah (1990) juga merinci beberapa ciri lain dari sikap nasionalisme manusia modern, yaitu: (1) Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari fanatisme berlebihan terhadap suku, agama, budaya dan ras, (2) Menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional, dan (3) Menjunjung dan mengupayakan suatu penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan teori Inkeles dan beberapa ahli kebangsaan lainnya yang terangkum dalam tulisan Martaniah (1990) penulis merumuskan enam karakter yang mewakili sikap nasionalisme, yakni: (1) Cinta terhadap tanah air dan bangsa dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, (2) Berpartisipasi dalam pembangunan, (3) Menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, (4) Memanfaatkan iptek, menghindari sikap apatis, terbuka pada perbaharuan dan perubahan, serta berorientasi pada masa depan, (5) Berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, dan (6) Siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan sebelumnya penulis merumuskan sikap nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Nasionalisme yang ideal seperti ini akan mengantarkan warga negara sebagai orang-orang yang mempunyai kualitas psikologis yang tinggi.

KEPUSTAKAAN

Abdulgani, R. (1964). *Nasionalisme Asia*. Jakarta: Yayasan Pancaka.

- Abdullah, T. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Amal, I. & Armawi, A. (1995). *Perkembangan Ilmu Sosial terhadap Konsep Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- De Dreu, CKW. & De Vries, NK. (2001). *Group Consensus and Minority Influence*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Effendi, AM. Rasa Nasionalisme dan Tuntutan Global. *Kompas*, 28 April 1995.
- Hara, AE. Kebanggaan Berbangsa Indonesia. *Kompas*, 17 Agustus 2000.
- Hendardi. Nasionalisme dan Hak Asasi Manusia. *Kompas*, 17 Februari 2000.
- Hidayat, DN. Nasionalisme dan Kemerdekaan Timtim. *Kompas*, 10 September 1999.
- Hobsbawm, EJ. (1992). *Nasionalisme Menjelang Abad 21*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Irwan, A. (2001). *Nasionalisme Etnisitas*. Yogyakarta: Dian/Interfidei.
- Kartodirjo, S. Biografi Tokoh Nasional. *Kompas*, 16 April 2001.
- Kartodirjo, S. (1993). *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kohn, H. (1984). *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Legge, J.D. (1961). *Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960*. New York: Cornell University Press.
- Martaniah, S.M. (1990). Konsep dan Alat Ukur Kualitas Berbangsa dan Bernegara. *Laporan Penelitian*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Prabowo. Terjadi Erosi Nasionalisme Kaum Muda. *Kompas*, 3 Mei 1995.
- Prasodjo, IB. The End of Indonesia. *Kompas*, 20 Desember 2000.
- Rachmat H.S.D. (1996). *Biduk Kebangsaan di Tengah Arus Globalisasi*. Jakarta: PT Tema Baru.
- Sarman, M. Memaknai Kembali Nasionalisme. *Kompas*, 19 Mei 1995.
- Sindhunata. Politik Kebangsaan dan Keadilan Sosial. *Kompas*, 5 Mei 2000.
- Snyder, L.L. (1968). *The New Nationalism*. New York: Cornell University Press.
- Sujatmiko, I.G. Integrasi dan Disintegrasi Nasional. *Kompas*, 20 Desember 1999.